

**PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016)**

**Hilda Adinta Wulandari**

**Abstrak**

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan begitu banyak kejahatan-kejahatan tentang tindak pidana narkotika. Hal ini memberikan dampak kerusakan fisik maupun psikis bagi penyalahguna narkotika. Saat ini, Narkotika menyentuh dan merambah di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di lingkungan akademisi, pelajar dan institusi bahkan aparat penegak hukum dan TNI. Dalam hal ini, penegakkan hukum bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam menegakkan ketentuan KUHPM diperlukan suatu lembaga yang secara independen memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan peranan dan fungsinya, dalam hal ini yang dimaksud lembaga adalah Polisi Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer dan hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan Militer Angkatan Darat. Penelitian ini bersikap deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan TNI yaitu Polisi Militer menerima laporan, melakukan olah TKP, membuat laporan Polisi, memanggil saksi-saksi, melakukan penangkapan dan penahanan. Hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu keterbatasan alat bukti. Alat bukti hanya berupa hasil tes urine yang berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya dilakukan proses pengambilan urine yang dilaksanakan di Denpom Jayakarta/2 maupun tempat-tempat pelaksanaan operasi razia, kemudian menyusun berita acara dan dikirim ke BNN untuk mendapatkan hasil. Polisi Militer hanya memiliki barang bukti hasil tes urine apabila pelaku penyalahguna narkotika dikenakan sebagai pemakai. Adanya kesulitan mencari alat bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimana saksi tidak mengetahui rekam jejak pemakaian atau penggunaan narkotika bagi pelaku. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga harus bekerjasama dengan kepolisian satuan narkotika untuk mengkoordinasi apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci :** Polisi Militer, Penyidikan, Narkotika, Tentara Nasional Indonesia.

# ***The Role of Army Military Police In The Investigation of Narcotics Crimes Within The Indonesian National Army***

**Hilda Adinta Wulandari**

## ***Abstract***

*Circulation and abuse of narcotics and drugs has reached a very alarming level. This give the physical and psychological damage to the narcotics abuser. Currently, narcotics touches and penetrates throughtout the society, not only in the academic environment, students and institutions even law enforcement officers and Indonesian National Army. In this case, law enforcement for narcotics abuse within the Indonesian National Army is regulated in the Criminal Law Code of Military (KUHPM) and The Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. In enfrocing the provisions of The Criminal Law Code of Military, an institution that is independently authorized to act in accordance with it is role and function shall be the Military Police in this case. This study aims to determine the process of investigation and barriers Army Military Police in tackling the crime of narcotics abuse among the Army. This research is descriptive with normative juridical approach. The result showed that the investigation process conducted by Military Police against narcotics crime within Indonesian National Army environment, The Military Police has received reports, conducted crime scene, made Police report, summoned witnesses, arrested and detained. Obstacles of Army Military Police in the criminal investigation of narcotics abuse is the limitation of evidence. The evidence is only the result of urine test based on the result of research from the National Narcotics Agency (BNN) which previously conducted the process of taking urine carried out in Detachment of Military Police Jayakarta/2 and places of operation of the raid, then compiled the news and sent to BNN to get result. Military Police only have evidence of urine test result if the narcotics abuser is charged as a user. There is a difficulty in finding evidence based on the testimony of witnesses in which the witness is not aware of the track record of usage or the use of narcotics for the perpetrator. Lack of personnel in the investigation department and should cooperate with police drug units to coordinate in case of involvement of Indonesian National Army members in narcotics abuse.*

***Keywords: Military Police, Investigation, Narcotics, Indonesian National Army.***